

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK
PIDANAKORUPSI DI INDONESIA**

TESIS

Oleh:
Vicky
201820272001



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang dalam Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia

Nama Mahasiswa : Vicky


Nomor Pokok : 201820272001

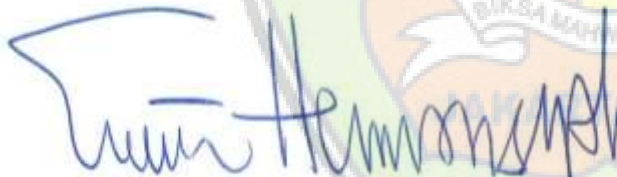

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum /
Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Pidana

Bekasi, 2 Februari 2019

MENYETUJUI:



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM

NIDN. 0319046403 NIDK.9903252859

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang dalam Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia

Nama Mahasiswa : Vicky

Nomor Pokok : 201820272001

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum /
Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Pidana

Bekasi, 2 Februari 2019

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji: Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM
NIDK.9903252859

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN.0319046403

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIDN.0316077604

Mengetahui,

PLH Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Pjs Dekan Fakultas Hukum

Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL., M.Ph.D.
NIDN. 0310127507

Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL., M.Ph.D.
NIDN. 0310127507

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya yang menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul

**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis dari orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan iji kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 2 Februari 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Vicky
201820272001

ABSTRAK

Vicky. 201820272001. **Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.**

Indonesia termasuk “Surga Dunia” bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk mencuci uang hasil kejahatan, uang dari hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Dari munculnya masalah tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah “*pertama*, Bagaimana Penerapan Hukum suatu tindakan pencucian uang berindikasi menjadi tindak pidana korupsi? *Kedua*, Bagaimana Kaitan antara tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana korupsi?”. Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada data primer. Temuan penelitian ini bahwasannya, Penerapan Hukum suatu tindakan pencucian uang berindikasi menjadi tindak pidana korupsi itu sudah tercantum dalam undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila mengandung 3 (tiga) unsur delik di dalamnya, Maka tindakan tersebut dikatakan tindak kejahatan korupsi. Adapun hubungannya antara tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana korupsi tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 huruf a, kasus tindak pidana pencucian uang merupakan tindak kejahatan pidana korupsi, maka dari itu tindak pidana pencucian uang itu mempunyai hubungan yang cukup erat dengan tindak pidana korupsi. Selain dalam Undang-undang sudah dijelaskan dengan adanya lembaga PPATK dan KPK itu juga membuktikan bahwa tindak kejahatan tersebut mempunyai hubungan, karena PPATK tidak mengatasi kasus kejahatan korupsi dan sebaliknya KPK juga tidak mengatasi kasus tindak kejahatan pencucian uang. Maka dari itu lembaga tersebut tetap berkaitan dengan kasus kejahatan tersebut.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Korupsi, PPATK, KPK.

ABSTRACT

Vicky. 201820272001. **The Juridical Review of The Money Laundering of Criminal Corruption in Indonesia.**

Indonesia is one of the world's paradise for evildoers as a money-laundering area. The money generally comes from a white-collar crime obtained from criminal corruption, so it can be said that the crime of being dominant in money laundering is money from criminal corruption. According to the problem the author takes two problem formulations: the first, how does the law of a money-laundering become a criminal corruption? and the second, how is the correlation between the money laundering against criminal corruption?. The type of research in this thesis is the normative juridical research with the descriptive characteristic shown on the primary data. The results of this research is the law of a money-laundering become a criminal corruption has been listed in the statute number 8 in 2010 about criminal money laundering, when it contains three (3) offense elements, so that the action is said to be a crime of corruption. Then the correlation between the money laundering against criminal corruption is listed in the statute number 8 in 2010 letter a, the money laundering is criminal corruption. Therefore, the money laundering has a close correlation with criminal corruption. Furthermore in the statute it is been explained in the presence of the PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center) and the KPK (Indonesia's Corruption Eradication Commission) which proves that both crimes have a correlation, because the PPATK does not solve corruption cases and the KPK does not solve money laundering cases. Therefore, both of these institutions relate to the case of the crimes.

Keywords: Money Laundering, Corruption, PPATK, KPK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga setelah melalui proses yang panjang akhirnya tugas penulisan tesis ini yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”** dapat terselesaikan dengan baik.

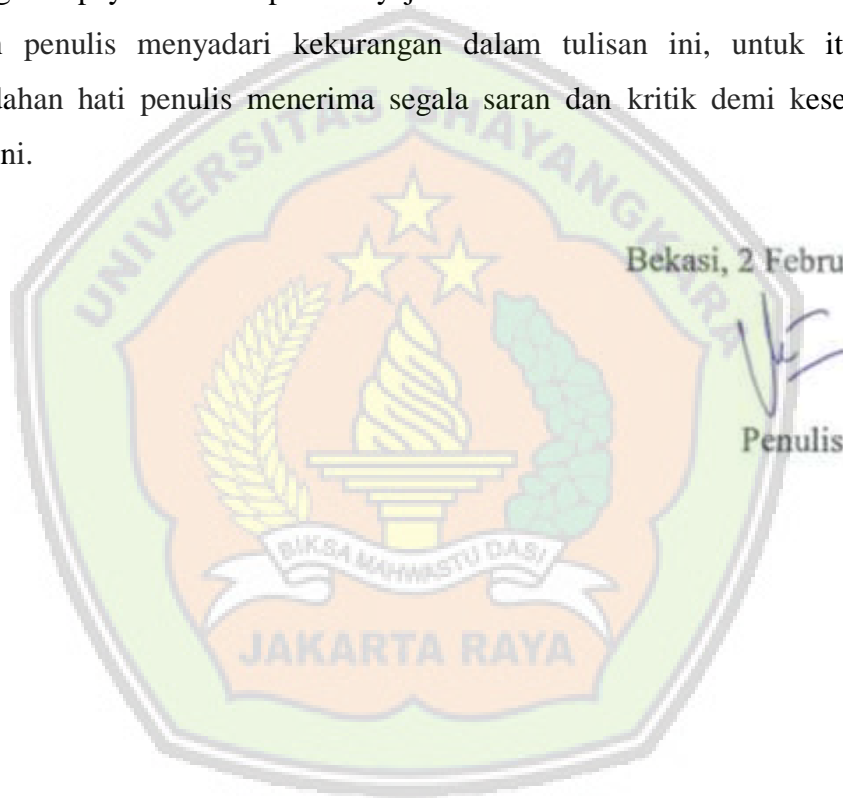
Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar magister hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Laporan ini dibuat dan disajikan dalam wujud yang demikian karena adanya dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak, maka dengan kerendahan hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM, Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL., M.Ph.D., Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., Selaku Pembimbing Satu Tesis.
4. Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM, Selaku Pembimbing Kedua Tesis.
5. Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Seluruh Akademis yang telah membantu berperan penting dalam proses pembelajaran.
6. Kepada seluruh staff Administrasi program studi magister hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah membantu peneliti selama menghadapi proses belajar.
7. Kedua Orang Tua Saya, Ayahanda Lutfi Karim yang telah memberikan inspirasi dan telah mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan dari Ibunda Hegieawaty yang telah bersusah payah melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya.

8. Adikku tersayang Vinnie, Vidhy yang selalu memberikan motivasi dan semangat pada proses pembuatan tesis ini.
9. Serta Sahabat saya Rifqi Aji Afrianto, Herry Maulana, Wahyu, Rizi, Bunga, Rico, Lee, Aang, Bagus, Fauzi yang selalu memberikan semangat dalam perkuliahan dan proses pembuatan tesis ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dorongan dalam kuliah dan dalam pembuatan Tesis ini.

Segala upaya untuk dapat menyajikan tulisan secara baik telah diusahakan, namun penulis menyadari kekurangan dalam tulisan ini, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima segala saran dan kritik demi kesempurnaan Tesis ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah	12
1.3.Rumusan Masalah	12
1.4.Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	13
1.5.Kerangka Konseptual.....	14
1.6.Kerangka Teori.....	19
1.7.Kerangka Pemikiran.....	21
1.8.Metedeologi Penelitian.....	22
1.9.Sistematika Penulisan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1.Tindak Pidana.....	25
A. Pengertian Tindak Pidana	25
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
2.2.Tindak Pidana Korupsi.....	28
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	28

B. Bentuk perbuatan Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Korupsi.....	39
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	45
D. Macam –Macam Tindak Pidana Korupsi.....	50
E. Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan	53
2.3.Tindak Pidana Pencucian Uang	54
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	54
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	59
C. Tujuan Pencucian Uang	62
D. Tahap Proses Pencucian Uang	63

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

3.1. Penerapan Hukum Suatu Tindakan Pencucian Uang Berindikasi Menjadi Tindak Pidana Korupsi.....	67
---	----

BAB IV HASIL ANALISIS

4.1.Hubungan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	81
A. GAMBARAN UMUM TENTANG PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).....	83
1. Sejarah Tentang PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)	84
2. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai Lembaga Independen	87
3. Fungsi dan Kewenangan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)	88
4. Struktur Organisasi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)	92
B. GAMBARAN UMUM TENTANG KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)	97
1. Sejarah Tentang KPK (Komisi Pemberantas Korupsi).....	97

2. Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	100
3. Fungsi dan Wewenang KPK.....	101
4. Struktur Organisasi KPK	105
BAB V PENUTUP	
5.1.Kesimpulan	114
5.2.Saran-Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

